

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan merupakan unsur penunjang, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, mempunyai tugas pokok membantu Walikota Gunungsitoli dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Gunungsitoli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli adalah :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni **“Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman Dan Berdaya Saing”**. Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mendukung pencapaian visi itu melalui *core business* Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli **“Mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan publik”**.

Dengan penetapan visi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan *core business* seperti yang diungkapkan di atas, isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli adalah memperbaiki kinerja aparatur pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan masyarakat secara optimal dan prima.

B. STRUKTUR ORGANISASI

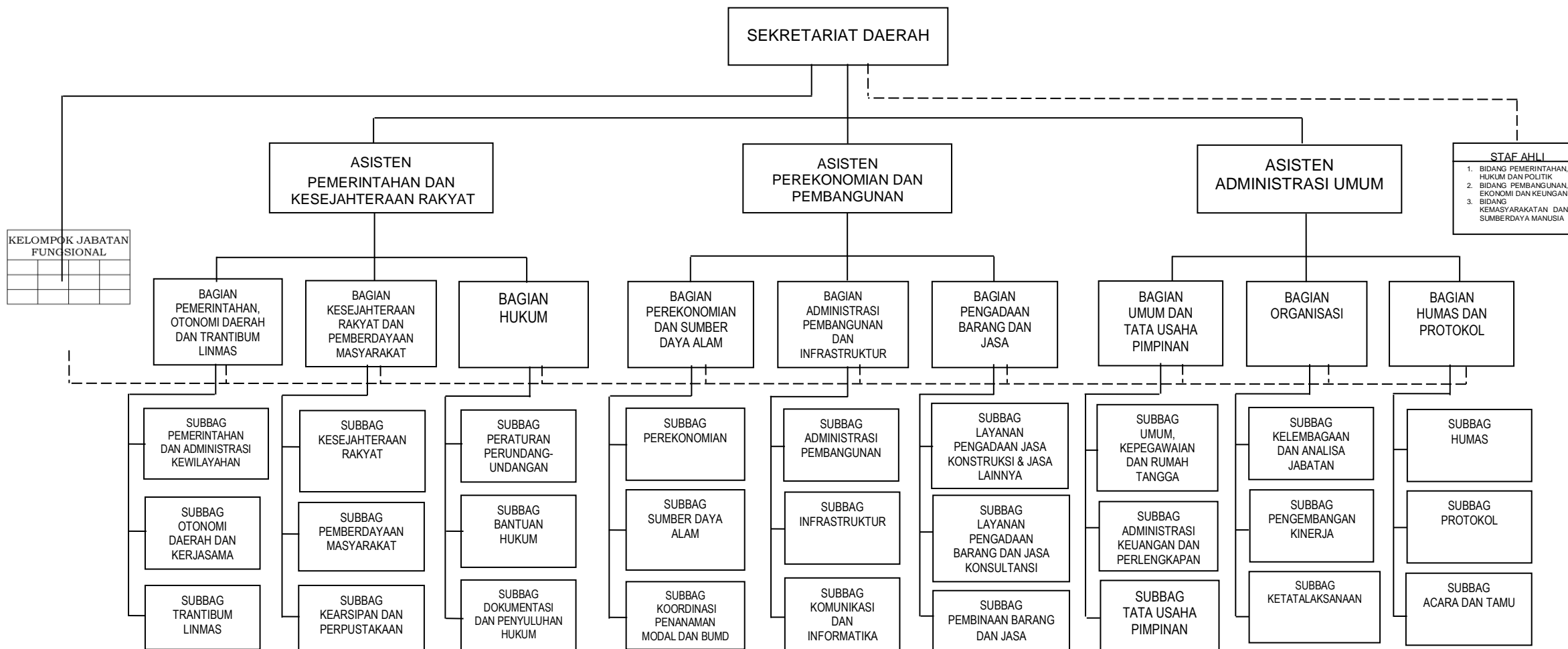
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 3 asisten dan 9 bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Trantibum Linmas
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum

- a. Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan
- b. Bagian Organisasi
- c. Bagian Humas dan Protokol

Gambar Struktur organisasi sebagaimana termuat dalam gambar 1.1 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI



C. KEADAAN PEGAWAI

Keadaan aparatur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 menurut kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Aparatur berdasarkan Pangkat pada
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017

No	PANGKAT/ GOL. RUANG	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	12
2	Pembina (IV/a)	8
3	Penata Tingkat I (III/d)	12
4	Penata (III/c)	10
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
6	Penata Muda (III/a)	25
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
8	Pengatur (II/c)	13
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	12
10	Pengatur Muda (II/a)	17
	Jumlah	116

Keadaan aparatur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 menurut tingkat pendidikan :

Tabel 1.2
Keadaan Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan pada
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Strata 3 (S-3)	-

2	Strata 2 (S-2)	6
3	Strata 1 (S-1)	53
4	Diploma IV (D-IV)	-
5	Diploma III (D-III)	17
6	Sarjana Muda/ BA/ B.Sc/ D-II	1
7	SMA/ SMK/ SPG/ SMEA/ STM	38
8	SLTP	1
Jumlah		116

Jumlah Aparatur yang menduduki jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Aparatur berdasarkan Jabatan dan Eselonering pada
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

No	JABATAN	Eselon				YANG BELUM TERISI	JUMLAH
		II.a	II.b	III.a	IV.a		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SEKRETARIS DAERAH	1	-	-	-	-	1
2	STAF AHLI WALIKOTA	-	4	-	-	1	5
3	ASISTEN	-	3	-	-	-	3
4	KEPALA BAGIAN	-	-	9	-	0	9
5	KEPALA SUB BAGIAN	-	-	-	13	14	27
JUMLAH		1	7	9	13	15	45

D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUKURAN KINERJA

Analisa strategi program (*strategic analisis programming*) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dengan pencermatan/identifikasi (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Kekuatan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :
 - a. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Gunungsitoli secara kuantitas cukup memadai;
 - b. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;
 - c. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
 - f. Adanya konsistensi dan kreatifitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
 - g. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Gunungsitoli.
2. Kelemahan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :
 - a. Belum optimalnya kualitas Sumber Day Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan

masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan yang tidak efektif dan efisien;

- b. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain;
- c. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Peluang Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :
 - (1). Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (2). Keberadaan Bandar Udara Binaka dan Pelabuhan Laut Angin Gunungsitoli telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Medan-Gunungsitoli dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang

jumlahnya meningkat serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang;

- (3). Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Gunungsitoli yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gunungsitoli;
- (4). Kota Gunungsitoli dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah;
- (5). Gunungsitoli sebagai pusat pendidikan di Kepulauan Nias;
- (6). Hubungan kerjasama antara Kota Gunungsitoli dan Kabupaten lain di kepulauan Nias, terutama dengan adanya program bersama yang difokuskan pada pembangunan Nias sebagai daerah wisata “Nias Pulau Impian” yang didukung oleh Pemerintah Pusat menjadi pendorong bagi Kota Gunungsitoli dan aparaturnya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Ancaman Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :

- (1). Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif;
- (2). Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan

dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Gunungsitoli sebagai kota jasa;

- (3). Populasi penduduk sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di kota Gunungsitoli;
- (4). Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar;
- (5). Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Gunungsitoli merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota yang cukup pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warning).

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;
 - b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien;

- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah;
- d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah;
- e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S-T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM;
- b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 merupakan LAKIP yang disusun berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

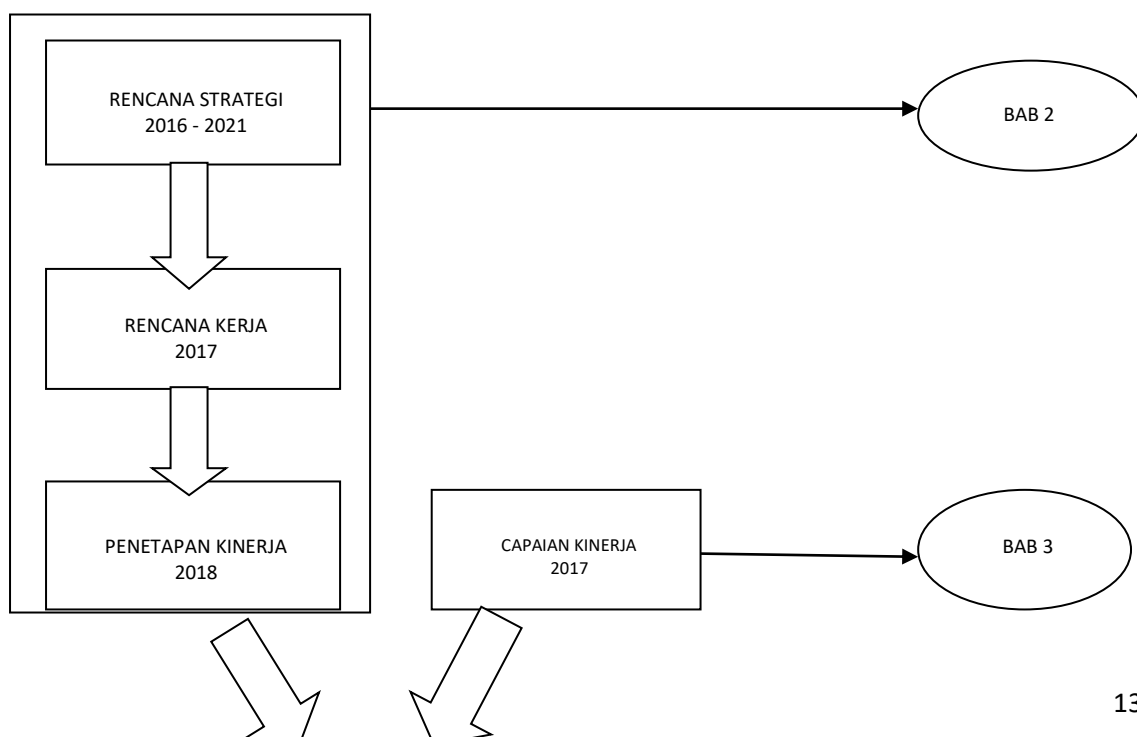
- Bab I Pendahuluan, pada Bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli serta uraian singkat mandate apa yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Bab II Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran

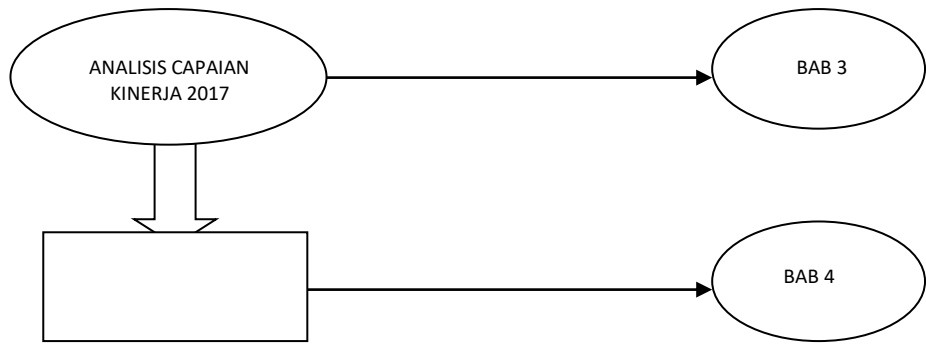
yang ingin diraih Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli melalui penetapan kinerja Tahun 2017;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksana tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi;

Bab IV Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 serta strategis pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

Dengan pola pikir seperti itu sistematika penyajian LAKIP Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :





Gambar 1.2
Alur Pikir Penyusunan LAKIP
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli 2017

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada isu-isu strategis yang timbul baik isu strategis lingkungan internal maupun eksternal yang akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mencakup pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan yang diuraikan dalam bab ini selanjutnya. Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif, konsisten dan antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut.

Visi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli adalah :

“MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut

1. Profesional

Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

2. Responsif

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

3. Pelayanan publik (*customer service*)

Secara umum pelayanan publik (*customer service*) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat / pelanggan.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan (keunggulan) tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan rumusan tujuan ini maka Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dapat secara tepat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya.

Tujuan rencana strategis yang dituangkan dalam visi Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli diarahkan pada tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan prakarsa serta disesuaikan dengan tuntutan aspirasi masyarakat yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum;
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri;
5. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan;
6. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada pimpinan daerah dan perangkat daerah;

Setelah merumuskan tujuan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan

strategis. Fokus utama dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara umum sasaran rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli terletak pada berbagai program dan kegiatan pembangunan yang didelegasikan kepada tiap-tiap Dinas, Badan, Instansi, Lembaga dan Satuan Unit Kerja dan segenap aparatur di wilayah Kota Gunungsitoli yang berfokus pada upaya mengoptimalkan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dalam hal pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien dan produktif dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan secara bertahap, adil dan merata.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 serta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Sasaran dan Indikator Kerja Sekretariat Daerah
Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021**

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai LPPD
SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan
SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	1. Jumlah pemekaran kecamatan
SASARAN 4	INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Jumlah terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah
SASARAN 5	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
SASARAN 6	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Standar Pelayanan di perangkat daerah	1. Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan
SASARAN 67	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota	1. Rata-rata IKM Kota Gunungsitoli 2. Rata-rata IKM Setda 3. Jumlah Kecamatan penyelenggara PATEN
SASARAN 8	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Kota Gunungsitoli 2. Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Setda
SASARAN 9	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	1. Jumlah Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri
SASARAN 10	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)	1. Jumlah Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri
SASARAN 11	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya capaian kinerja kebijakan SDA/LH	1. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik
SASARAN 12	INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perangkat daerah yang dikendalikan rencana dan realisas PBJ nya 2. Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
SASARAN 13	INDIKATOR KINERJA
Terbinanya BUMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable
SASARAN 14	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peringatan hari besar keagamaan
SASARAN 15	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan di perangkat daerah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perpustakaan 2. Koleksi perpustakaan 3. Peningkatan administrasi pengelola kearsipan
SASARAN 16	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk penerima Rastra
SASARAN 17	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis web
SASARAN 18	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja aparatur dan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi finger print 2. Website Pemerintah Kota Gunungsitoli 3. Peningkatan SDM Pengelola Persandian
SASARAN 19	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian di Sekretariat Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan gudang kearsipan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli memiliki 23 kebijakan, yaitu :

1. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
2. Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan
3. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
4. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya
5. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM
6. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
7. Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
8. Seluruh perangkat daerah di Kota Gunungsitoli wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan LKj)
9. Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah
10. Seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib mematuhi aturan yang berlaku
11. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan
12. Seluruh perangkat daerah yang akan melaksanakan kerjasama dengan pihak dalam/luar negeri untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Trantibum Linmas

13. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan setiap kerjasama dalam/luar negeri yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan
14. Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
15. Fasilitasi penyusunan progress reeport kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)
16. Penyempurnaan regulasi di bidang ekonomi
17. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi
18. Membentuk kelembagaan/forum komunikasi dengan pihak swasta komunitas
19. Memberikan penghargaan kepada swasta dan komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota
20. Membuat SOP Pola Kolaborasi Kegiatan dan pemberian penghargaan kepada unsur Quadro Helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)
21. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan Program Kegiatan terkait Bidang Ekonomi serta Perusahaan Swasta/BUMN wajib melaporkan hasil kegiatan CSR di Kota Gunungsitoli
22. Penerapan Standar Akutansi Pemerintah
23. Penerapan konsep paperless dan e-office

Sebagai gambaran ringkas terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

Visi : Mewujudkan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan publik

- Misi :
1. Mewujudkan (Keunggulan) tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan;
 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan peyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah 2. Mendorong perangkat daerah untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid 	Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Melaksanakan pemekaran kecamatan 	Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan

<p>2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum</p>	<p>1. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	<p>Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum</p>	<p>1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM</p>
<p>3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah</p>	<p>1. Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p>	<p>Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan</p>
	<p>2. Meningkatnya standar pelayanan di satuan kerja perangkat daerah/unit kerja 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota</p>	<p>1. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien 2. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik 3. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap perangkat daerah yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui</p>	<p>Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>

		<p>sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan</p> <p>4. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap perangkat daerah. Dalam rangka perwujudan “<i>Good Governance</i>” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik</p> <p>5. Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi</p>	
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<p>1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah di Kota Gunungsitoli secara berkala</p> <p>4. Memberikan reward dan Punishment dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah</p>	Seluruh perangkat daerah di Kota Gunungsitoli wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan LKj)

<p>4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri</p>	<p>1. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama daerah</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian dan LPNK, serta Instansi Pemerintahan lainnya</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia dan APEKSI.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli</p> <p>4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah.</p> <p>5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan.</p> <p>6. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.</p>	<p>1. Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah</p> <p>2. Seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib mematuhi aturan yang berlaku</p> <p>3. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan</p>
	<p>2. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah, lembaga resmi lainnya di dalam negeri</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan City Net</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Kementrian</p>	<p>1. Seluruh perangkat daerah yang akan melaksanakan kerjasama dengan pihak dalam/luar negeri untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Trantibum Linmas</p> <p>2. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan setiap kerjasama dalam/luar negeri yang telah dilaksanakan oleh</p>

		<p>Luar Negeri dan Sekretariat Negara RI</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perwakilan negara lain di Indonesia</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli</p> <p>6. Monitoring pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli</p>	perangkat daerah yang bersangkutan
<p>5. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan</p>	<p>1. Meningkatnya capaian kinerja kebijakan SDA/LH</p> <p>2. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam</p>	<p>1. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan sosial masyarakat kota</p> <p>2. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan</p> <p>4. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala pada perangkat daerah</p>	<p>1. Pengendalian kebijakan Kepala Daerah</p> <p>2. Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)</p>
	<p>3. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)</p> <p>4. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya</p>	<p>1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi</p>	<p>1. Penyempurnaan regulasi di bidang ekonomi</p> <p>2. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi</p> <p>3. Membentuk kelembagaan/forum komunikasi dengan pihak swasta dan komunitas</p> <p>4. Memberikan penghargaan kepada</p>

	<p>Gunungsitoli sebagai Kota Maju dan Berdaya Saing</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terbinanya BUMD 6. Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan di perangkat daerah dan masyarakat 7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan 	<p>sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi makro; 3. Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 4. Mensinergikan program kegiatan pembangunan dengan unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 5. Memfasilitasi dan mengapresiasi kegiatan Stakeholder dalam pengembangan ekonomi kota melalui pemberian penghargaan, pembentukan wadah/forum komunikasi dengan swasta dan komunitas, 6. Monitoring dan Evaluasi hasil Program Kegiatan bidang ekonomi sebagai bahan kebijakan selanjutnya 	<p>swasta dan komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat SOP Pola Kolaborasi Kegiatan dan pemberian penghargaan kepada unsur Quadro Helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 6. Seluruh perangkat daerah wajib melaporkan Program Kegiatan terkait bidang Ekonomi serta Perusahaan Swasta/BUMN wajib melaporkan hasil kegiatan CSR di Kota Gunungsitoli)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan pembinaan tri kerukunan umat beragama 3. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan sosial masyarakat kota 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja aparatur dan perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 2. Penerapan konsep paperless dan e-Office

daerah	2. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah 2. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan 3. Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang 4. Efektifitas kinerja penatausahaan internal (Setda Kota Gunungsitoli) 5. Optimalisasi pelayanan penatausahaan perangkat daerah 6. Penatausahaan berbasis web	
--------	--	---	--

C. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan rencana kinerja (Renja) Tahun 2017, telah ditetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai salah satu strategi pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja dimuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tabel 2.3.

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017, telah ditetapkan besaran anggaran Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 di bawah ini

Tabel 2.4
Ringkasan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016

No	URAIAN	Anggaran (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	6.898.829.123,-
	- Belanja Pegawai	6.898.829.123,-
2	Belanja Langsung	18.629.448.000,-
	- Belanja Pegawai	3.965.215.000,-
	- Belanja Barang dan Jasa	12.892.883.000,-
	- Belanja Modal	1.771.350.000,-
JUMLAH		25.528.277.123,-

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing target indikator sasaran seperti disebut di atas, serta dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan indikator sasaran sebanyak 19 (sembilan belas) terhadap 19 (sembilan belas) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan sebagai salah satu strategi pencapaian sasaran sebagaimana pada lampiran 2 dan lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan atas indikator kinerja input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) setiap kegiatan.

Pada Tahun 2017, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata indikator kinerja sasaran sebesar 81,89% dengan daya serap anggaran sebesar 50,31%.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi. Sasaran indikator tersebut dapat diuraikan dalam tabel pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 6 (enam) indikator sasaran yang dipakai sebagai variable pengukurannya, sebagai berikut :

Tabel 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KESATU

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016	13%	85,84%	6,6
2	Rasio Sosialisasi dan Penyusunan LKj (Laporan Kinerja) Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli			
3	Rasio Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016			
4	Rapat Kerja Pemerintahan			
5	Rasio Rapat Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan instansi vertikal di wilayah Kota Gunungsitoli			
6	Rasio Koordinasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara			

	Tahun 2017			
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 1				6,38

Dari 6 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2017 mencapai 6,38%.

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator sasaran yang dipakai sebagai variable pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KEDUA

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Kota Gunungsitoli	20%	100,00%	5
2	Rasio Penegasan Batas Wilayah Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara			
3	Rasio Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli			
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 2				2,06%

Dari 3 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata

tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 2,06%.

3. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, ditetapkan 6 (enam) indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KETIGA**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Penelaahan dan Perumusan Produk Hukum Daerah Kota Gunungsitoli	15%	86,95%	5,7
2	Rasio Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
3	Rasio Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia			
4	Rasio Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Aparat Pemerintah Kota Gunungsitoli			
5	Rasio Pelaksanaan Penyuluhan Hukum			
6	Rasio Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 3				4,48

Dari 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata

tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2017 mencapai 4,48%.

4. Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, meningkatnya standar

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, ditetapkan 6 (enam) variable indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.4
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KEEMPAT

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	15%	69,63%	4,6
2	Rasio Examinasi Terhadap berbagai Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Gunungsitoli	15%	88,19%	5,8
3	Rasio Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan	0%	88,97%	0
4	Rasio Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparat Pemerintah Kota Gunungsitoli	15%	27,79%	1,8
5	Rasio Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Gunungsitoli	20%	93,33%	4,6
6	Rasio Pengundangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli dan	15%	95,00%	6,3

	Peraturan Walikota Gunungsitoli			
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 4				3,85%

Dari 6 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 3,85%.

5. Terciptanya Pembinaan Tata Pemerintah Daerah Bawahan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 7 (tujuh) variable indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.5
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KELIMA**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota Gunungsitoli	15%	95,33%	6,3
2	Rasio Pemilihan Kecamatan Terbaik Kota Gunungsitoli	20%	89,31%	4,4
3	Rasio Penegasan Batas Daerah Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Lain	0%	0,00%	0
4	Rasio Penegasan Batas Desa di Kota Gunungsitoli	20%	0,00%	0
5	Rasio Pemasangan Pilar Batas Desa/Kelurahan di Kota Gunungsitoli	0%	0,00%	0
6	Fasilitasi Forum Sekretaris	0%	36,12%	0

	Daerah Seluruh Indonesia			
7	Fasilitasi Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias	0%	0,00%	0
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 5				1,52

Dari 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 1,52 %.

6. Terciptanya Pembinaan Kebijakan Organisasi, Kelembagaan Dan Tata Laksana

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 10 (sepuluh) variable indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.6
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KEENAM**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi dan Tata Kerja	40%	98,77%	2,4
2	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan	20%	98,22%	4,9

	(UPTB) Daerah			
3	Rasio Fasilitasi Tim Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Gunungsitoli	0%	97,87%	0
4	Rasio Penyusunan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum	0%	99,44%	0
5	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli	20%	98,72%	4,9
6	Rasio Fasilitasi Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	20%	100,00%	5
7	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Tertentu	0%	99,04%	0
8	Rasio Penyusunan Buku Analisa Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	15%	99,99%	6.6
9	Rasio Penyusunan Buku Analisa Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	20%	0%	0
10	Rasio Penyusunan Buku Informasi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	20%	98,40%	4,9

PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 6	2,87
---	------

Dari 10 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 2,87 %.

7. Terciptanya Pembinaan Pengendalian Tugas Penyelenggaraan Pembangunan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) variable indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.7
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KETUJUH**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Rapat Koordinasi Pemerintahan	15%	98,78%	6,5
2	Rasio Rapat Koordinasi Kecamatan	15%	97,20%	6,4
3	Rasio Rapat-Rapat Koordinasi Perekonomian dengan Instansi Terkait	20%	86,48%	4,3
4	Rasio Pengawasan Harga Barang-Barang menjelang Hari-hari Besar Keagamaan	20%	91,68%	4,5
5	Rasio Sosialisasi Barang-Barang Bersubsidi di Wilayah Kota Gunungsitoli	20%	98,45%	4,9
6	Rasio Fasilitasi Penyaluran Raskin di Kota Gunungsitoli	0%	97,83%	0
7	Rasio Pengawasan dan Pemantauan tentang Pendistribusian Barang-Barang Bersubsidi di	20%	98,82%	4,9

	Kota Gunungsitoli			
8	Rasio Desk Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilukada	0%	96,13%	0
9	Rasio Desk Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif	40%	0,00%	0
10	Rasio Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Gunungsitoli	0%	83,63%	0%
11	Rasio Pemantauan Pelaksanaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Kota Gunungsitoli	0%	99,00%	0
12	Rasio Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Gunungsitoli	0%	26,05%	0
13	Rasio Optimalisasi dan Penguatan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)	0%	95,38%	0
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 7				2,42%

Dari 13 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata

tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 2,42 %.

8. Terciptanya Pembinaan Kebijakan Bidang Pertanahan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 2 (dua) variable indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KEDELAPAN

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Inventarisasi dan Identifikasi Tanah-Tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli	10%	0,00%	0
2	Rasio Pensertifikatan Tanah-Tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli	20%	0,00%	0
PERSENTASE RATA-RATA TARGET PENCAPAIAN SASARAN 8				0

Dari 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya masih belum maksimal sehingga persentase capaian sasaran ini masih nihil/ tidak ada yang tercapai.

9. Terciptanya Pembinaan Kebijakan Bidang Pertambangan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 7 (tujuh) variable indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.9
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KESEMBILAN

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Rasio Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan	20%	0	0

2	Rasio Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air	0%	90,63%	0
3	Rasio Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20%	94,06%	4,7
4	Rasio Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat	15%	0,00%	0
5	Rasio Pendapatan Potensi Sumber Daya Alam (Lanjutan)	0%	83,69%	0
6	Rasio Inventarisasi Aplikasi Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Bio Teknologi Pertanian	0%	96,46%	0
7	Rasio Uji Sampel Komoditas Tambang Unggulan	20%	95,39%	4,7
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 9				1,34

Dari 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 1,34%.

10. Terciptanya Pembinaan Kebijakan Bidang Kearsipan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran di atas, maka ditetapkan 9 (sembilan) variable indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.10
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KESEPULUH**

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
----	-------------------	--------	-----------	----------

1	Rasio Bimbingan Teknis Sistem Kearsipan	15%	99,12%	6,6
2	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	0%	100,00%	0
3	Rasio Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	15%	99,75%	6,6
4	Rasio Pengadaan Sarana Perpustakaan Umum Daerah	0%	100,00%	0
5	Rasio Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	0%	100,00%	0
6	Rasio Penataan Piranti Keprotokolan	15%	100,00%	6,6
7	Rasio Penataan Piranti Pendokumentasian	15%	100,00%	6,6
8	Rasio Penyusunan Peraturan tentang Keprotokolan pada Pemerintah Kota Gunungsitoli	0%	100,00%	0
9	Rasio Pembuatan Pendokumentasian Kegiatan Daerah	0%	100,00%	0
PERSENTASE RATA-RATA PENCAPAIAN TARGET SASARAN 10				2,97

Dari 9 indikator sasaran yang telah ditetapkan capaiannya sangat maksimal meskipun penyerapan dana dilakukan seefisien mungkin. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran satu pada tahun 2016 mencapai 2,97%.

C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2016 Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 sebesar Rp 25.528.277.123,- yang secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara garis besar keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan dalam table 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Anggaran Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung	6.898.829.123,-	6.453.544.835,-	93,54
II	Belanja Langsung	18.629.448.000,-	15.256.572.481,-	81,89
JUMLAH		25.528.277.123,-	21.710.117.316,-	85,04

Untuk efisiensi dan efektifitas anggaran belum adanya standar yang baku sehingga penghematan anggaran tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota Gunungsitoli, sehingga anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA. Untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk kelompok belanja langsung khususnya belanja modal ada sebagian yang dapat dikatakan mengalami efisiensi karena dana yang ditargetkan lebih kecil dari realisasi, sedangkan untuk keluaran tetap dilaksanakan secara penuh.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan itu, Sekretariat Daerah telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Vlsi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni “Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman, dan berdaya saing”. Sekretariat Daerah secara umum telah berhasil mencapai target. LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2017 kinerja dan sasaran secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 50,31%.

Berbagai fungsi pelayanan yang diemban Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli sebagai pemberi fasilitator dan advisor terbaik kepada Walikota Gunungsitoli dan perangkat daerah lainnya telah berdampak positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kota Gunungsitoli diantaranya dengan terus melakukan penataan organisasi perangkat daerah termasuk organisasi kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Walikota Gunungsitoli, perangkat daerah dan masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang timbul. Langkah – langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat dengan menempuh

berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.

Secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dalam rangka mengimplementasikan visinya sebagai fasilitator dan advisor terbaik kepada Walikota Gunungsitoli dan perangkat daerah lainnya adalah :

- a. Kurang optimalnya koordinasi perumusan serta implementasi kebijakan yang berorientasi pada pelayanan dan pemberian advis terbaik bagi kepala daerah dan perangkat daerah yang akan berakibat secara signifikan terhadap kurang optimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang kualified yang dapat menterjemahkan visi Sekretariat Daerah secara maksimal;
- c. Masih adanya peran Sekretariat Daerah sebagai institusi yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berakibat terjadinya duplikasi dan tumpang tindih dengan fungsi dan peran dinas/kantor sebagai lembaga teknis yang memberikan pelayanannya secara langsung kepada masyarakat.

B. SARAN

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan seperti yang disebutkan di atas, maka strategi pemecahan masalah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli adalah :

1. Membangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang diharapkan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan;
3. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja;
4. Mengembangkan system informasi pengumpulan data kinerja;
5. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelolaan kegiatan;

6. Peningkatan koordinasi antar bagian;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
8. Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi Sekretariat Daerah.

Demikian core area Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yaitu Mewujudkan birokrasi Pemerintah daerah yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan publik di Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat diwujudkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

GUNUNGSITOLI, JANUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

PEMBINA TK. I
NIP.